

SKRIPSI

**MANAJEMEN BENCANA BANJIR BERBASIS MITIGASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**MANAJEMEN BENCANA BANJIR BERBASIS MITIGASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
(SI) Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH YUSRIL WAHYUDDIN

Nomor Stambuk : 105641110618

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
Tgl. Pengantar	26/08/2022
Nama Pengantar	—
Jumlah	1 ep
Harah	Sub. Alumni
Nomor Politik	—
No. Stambuk	P/0093/IPM/22 ep WAH m'

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
Nama Mahasiswa : Muh. Yusril Wahyuddin
No. Stambuk/NIM : 105641110618
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

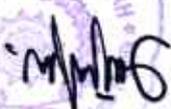

Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I


Hardianto Hawing, S.T., M.A

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 054/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022.

Tim Penilai,

Ketua	Sekretaris
	
<u>Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si</u>	<u>Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u>
NBM: 730727	NBM: 992797

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua))

2. Drs. H. Ansyari Mone, MPd)

3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I)

4. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Yusril Wahyuddin

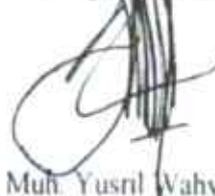
Nomor Stambuk : 105641110618

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 22 Juli 2022

Yang menyatakan



Muh. Yusril Wahyuddin

ABSTRAK

Muh. Yusril Wahyuddin 2022. Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. (Dibimbing oleh Ahmad Harakan dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen bencana banjir berbasis mitigasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan bencana banjir pada wilayah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi penegasan kesimpulan. Pengapsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen bencana banjir berbasis mitigasi di Kabupaten Jeneponto bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana banjir dengan melakukan pembangunan fisik, dan penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, upaya mitigasi yang dilakukan, diharapkan mampu untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana dengan melakukan peningkatan kapasitas suatu wilayah sehingga tujuan dari mitigasi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan begitu upaya mitigasi yang dilakukan pemerintahan dapat dikatakan berhasil dalam menanggulangi permasalahan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya mitigasi merupakan kunci dari keberhasilan dalam penanggulangan bencana banjir, sehingga seluruh masyarakat dan harta bendanya dapat terlindungi serta merasa aman dan nyaman berada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto.

Kata Kunci : Manajemen Bencana, Bencana Banjir, Mitigasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto"**. Tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca secara umum dan secara khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama dan yang paling istimewa penulis persembahkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua, Bapak Jamaluddin dan Ibu Hasnah tercinta berkah doa dan dukungan moral maupun moril, perhatian maupun kasih sayang yang begitu luar biasa tulus tumpah pamrih. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada saudara-saudara penulis kakak Husnaeni terimakasih banyak sudah menjadi saudara yang hebat untuk penulis.

Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Pembimbing I Ayahanda Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I dan pembimbing II Bapak Hardianto Hawing, S.T., M.A yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Kepada Staf Tata usaha atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
5. Para penguji yaitu Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si, Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd, Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I, serta Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP yang telah senantiasa meluangkan waktunya, menguji sekaligus membimbing dan mengarahkan penulis, memotivasi, serta memberi saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Terimakasih kepada Segenap keluarga Besar HIMJIP, Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, dan angkatan 2018 terkhusus ucapan terimakasih kepada Demisioner Pengurus HIMJIP priode 2020-2021.

7. Untuk saudara Adrian Hidayatullah, Muh. Ilham, Muh. Nakdi, dan Irfan terimakasih telah menjadi sahabat dan teman terbaik sejak kecil hingga sekarang dan telah menemani penulis dimasa yang sulit dan senang.
 8. Teruntuk Hedir Alamsyah, M Husni Almubarak, dan Muh. Akbar Fillaturahman terimakasih banyak sudah menjadi saudara di tanah rantauan sudah menjadi patnert dalam suka dan duka untuk penulis selama ini.
 9. Untuk Tipani Chamira, Iis Suedi, dan Ainia Zdikra terimakasih selalu ada untuk penulis disaat penulis membutuhkan.
 10. Serta ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 22 Juli 2022

Yang menandatangani



Muli Yusri Wahyuddin

Daftar Isi

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERYANTAAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian terdahulu.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	22
D. Fokus Penelitian.....	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	29
BAB IV.....	31
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31

1. Deskripsi Kabupaten Jeneponto.....	31
2. Deskripsi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33
3. Tugas BPBD	34
4. Fungsi BPBD	34
B. Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto	38
1. <i>Risk (risiko)</i>	40
2. <i>Hazard (Ancaman/Bahaya)</i>	47
3. <i>Vulnerability (Kerentanan)</i>	53
4. <i>Capacity (Kapasitas)</i>	58
5. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto).....	64
C. Pembahasan.....	70
1. <i>Risk (Risiko)</i>	70
2. <i>Hazard (Ancaman/Bahaya)</i>	71
3. <i>Vulnerability (Kerentanan)</i>	69
4. <i>Capacity (Kapasitas)</i>	70
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81
RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	7
Tabel 3.1.....	27
Tabel 4.1.....	32
Tabel 4.2.....	33
Tabel 4.3.....	49
Tabel 4.4.....	51
Tabel 4.5.....	52
Tabel 4.6.....	66
Tabel 4.7.....	66
Tabel 4.8.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	22
Gambar 4.1	39
Gambar 4.2	41
Gambar 4.3	44
Gambar 4.4	48
Gambar 4.5	53
Gambar 4.6	56
Gambar 4.7	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Pahleviannur, 2019). Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor (Tondobala, 2012).

Dalam setiap bencana tentunya perlu yang namanya penanggulangan bencana agar lebih meminimalisir terjadinya bencana secara terus menerus. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (P. Lestari, 2018). Penanggulangan bencana memerlukan sebuah pengaturan tentang penataan ruang dan harus berbasis mitigasi bencana (Tondobala, 2012). Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana,

Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 (Islam, 2021). Berkaitan dengan itu, hal tersebut merupakan upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dengan serta mengurangi dampak dari bencana seperti kerusakan lingkungan, jatuhnya korban, serta kerugian harta benda. Peristiwa bencana selain dapat menelan korban jiwa dan merugikan secara materi, juga akan berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan yang menguasai hajat hidup orang banyak di suatu daerah.

★ Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (INDONESIA, 24 C.E.).

Bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jeneponto pada lima Kecamatan dan terjadi setiap kali memasuki musim hujan selama tiga tahun terakhir ini. Pada tanggal 23 Januari 2019 Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto di terjang banjir 13 orang meninggal, 4 orang hilang, 438 rumah rusak (regional.kompas.com, 2019). Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Jeneponto Kecamatan Rumbia pada

jumat (12/6/2020). Kejadian itu tiga orang meninggal dan 20 rumah warga mengalami kerusakan (regional.kompas.com, 2020). 7 juli 2021 banjir menggenangi 4 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yakni, Kecamatan Tarowang, Batang, Arungkeke dan Kecamatan Binamu tercatat 64 rumah mengalami kerusakan dan infrastruktur umum lainnya (Jeneponto.terkini.id, 2021).

Peristiwa ini baru terjadi semenjak 3 (tiga) Tahun terakhir yang dimana sebelumnya belum pernah terjadi banjir yang banyak memakan korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar mulai dari Tahun 2019 sampai pada Tahun 2021. Adanya kondisi yang kurang optimal dalam penanggulangan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jeneponto sehingga menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat khususnya daerah rawan banjir karena dalam kurun waktu tiga tahun telah terjadi bencana banjir bandang di lima Kecamatan dan Kecamatan Binamu sudah dua tahun berturut-turut mengalami banjir bandang. Banjir yang terjadi di akibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai dan jebolnya beberapa cekdam yang membawa lumpur ke permukiman warga dan menyeret beberapa rumah ke aliran sungai tersebut.

Perlunya kerjasama yang massif antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan BPBD Kabupaten Jeneponto untuk melakukan *assesment* dan mengkaji secara cepat terhadap segala kerusakan dari dampak bencana banjir dan longsor tersebut sehingga masyarakat dapat cepat tertolong.

Perhatian pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan Logistik berupa bahan makanan, air bersih, pakaian dan tenda pengungsian sangat di perlukan oleh masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang. Tentu dengan kerjasama Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Jeneponto di harapkan mampu mengurangi dampak dan resiko terjadinya bencana sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman di lingkungannya, akan tetapi masyarakat juga perlu memahami bagaimana menjaga lingkungan dengan baik dengan melakukan penyadaran terhadap masyarakat tentang bagaimana menjaga lingkungan dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan manajemen bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu judul penelitian yang di gunakan adalah **"MANAJEMEN BENCANA BANJIR BERBASIS MITIGASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu:

Bagaimana Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan.

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti yang lain Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan pada umumnya dan pada khususnya bidang ilmu pemerintahan mengenai "Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto"

b. Bagi peneliti itu sendiri penelitian tentang "Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto" diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai manajemen bencana dan mitigasi bencana sehingga dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pembekajaran terutama saat melaksanakan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi, khususnya kepada masyarakat jeneponto daerah rawan

banjir agar dapat lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya agar dapat meminimalisir bencana

- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan kepada pemerintah mengenai Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi agar kedepannya dapat lebih memperhatikan daerah rawan banjir agar dapat lebih meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat Jenepon.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai dasar pengembangan bagi peneliti selanjutnya untuk mencari perbandingan dengan penelitian sebelumnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya (Nugrahani & Hum, 2014). Penelitian terdahulu sangat penting sebagai tolak ukur untuk sebuah penelitian baru. Dalam penelitian berjudul **“Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto”**, menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Fadillah et al., 2020)	Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana.	Bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan. Pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ancaman gempa bumi di

			wilayah Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat belum dapat dikatakan optimal dalam melaksanakan peranannya.
2.	(Suryana et al., 2018)	Mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bojong kecamatan majalaya Kabupaten Bandung.	Kondisi geografis daerah penelitian sebagai hasil observasi, dan melalui angket dihasilkan data tentang Mitigasi Bencana Banjir yang Dilakukan oleh masyarakat Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Setelah dianalisis terbukti bahwa Faktor pendukung pelaksanaan mitigasi banjir oleh masyarakat, meliputi faktor sikap perilaku masyarakat, faktor tingkat ekonomi faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan, faktor sikap masyarakat terhadap sungai faktor-faktor geografis yang menjadi kendala mitigasi banjir, meliputi faktor hidrologi faktor litosfer dan faktor Hydro-Meteorologi, pelaksanaan mitigasi

			bencana banjir yang dilakukan oleh masyarakat meliputi tiga tahapan yaitu sebelum, sesaat, sesudah
3.	(Istiqomah, 2019)	Studi Peran Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Kabupaten Sampang	Peran pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca banjir lemah, tim penilai kebutuhan pasca bencana belum terbentuk sesuai dengan SK peran BPBD yang hanya berfungsi sebagai koordinator. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca banjir dilaksanakan oleh instansi pelaksana teknis terkait. Sehingga peran yang dijalankan tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Pelaksanaan asesmen kebutuhan pascabencana belum memiliki legalitas yang jelas, padahal asesmen kebutuhan pascabencana merupakan poin penting

			dalam pelaksanaan tanggap darurat pascabencana.
4.	(Arifianto & Virhani, 2009)	Kasus Penanggulangan Banjir di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan	Program penyampaian informasi bencana banjir di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, masih dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, penyampaian informasi kebencanaan hingga saat ini masih memiliki himbauan dan dijadikan pengetahuan bagi masyarakat di kawasan Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Informasi bencana di wilayah Kelurahan Bukit Duri dapat dipahami dengan cukup baik oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, untuk mencari dan mendistribusikan informasi tentang masalah bencana alam bagi masyarakat di daerah rawan bencana, terlihat bervariasi.

5.	(Awaliyah, 2014)	Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga	Pengetahuan masyarakat Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dalam mitigasi bencana banjir kategori sedang.
----	---------------------	--	--

Berdasarkan hasil temuan peneliti terhadap penelitian terdahulu yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini terletak pada daerah penelitian. Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi pada penelitian kali ini terfokus di Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini dapat dilihat juga strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani bencana alam banjir di kabupaten tersebut. Juga mengetahui bagaimana dampak jika tidak di tangani secara cepat dan maksimal.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Manajemen Bencana

Manajemen Bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Cara bekerja Manajemen Bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap siklus kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara

lain untuk melindungi masyarakat beserta harta-bendanya dari (ancaman) bencana (Hadi et al., 2019).

Model perkembangan pengelolaan bencana terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi permasalahan bencana yang terjadi. Pada masa sebelum modern pengelolaan bencana telah dilakukan oleh manusia dengan membuat perahu sebagaimana yang ditunjukkan dalam kitab suci agama Islam, Kristen, dan Yahudi ketika Nabi Nuh dan umatnya akan diturunkan hujan badai yang mengakibatkan banjir besar (Copolla 2009). Mereka telah menggunakan proses-proses pengelolaan bencana yang menggunakan pendekatan yang saat ini dikenal dengan *decision analysis*. Proses ini pada awalnya melakukan analisis bahaya, kemudian menyusun alternatif pencegahan/pengurangan yang kemudian dikemukakan hasil yang diharapkan.

Kemudian pada masa modern pengelolaan bencana telah dilakukan hampir diseluruh dunia, meskipun masih didominasi dengan pendekatan respon atau pada saat bencana. Pendekatan untuk pengelolaan bencana yang komprehensif dari mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan rekonstruksi baru dimulai sejak pertengahan abad ke-20 (Copolla 2009).

Ada lima model manajemen bencana yang dikelompokkan oleh Sudibyakto dkk (2017) dan Oxfam (2012) yaitu: *Disaster Management Continuum Model*, *Pre-During-Post Disaster Model*, *Contract Expand*

Model, The Crunch And Release Model, Dan Disaster Risk Reducation Framework.

Secara umum, manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari prabencana, saat terjadi bencana, dan pascabencana. Tahap prabencana meliputi (Sahri et al., 2020):

1. Mitigasi (*mitigation*), merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
2. Kesiapsiagaan (*preparedness*), merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Manajemen pengelolaan bencana sebagai berikut: (Adiyoso, 2018)

1. *Risk* (Risiko) adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari kehidupan dan mempengaruhi setiap manusia dimanapun.
2. *Hazard* (Ancaman/Bahaya) adalah kondisi atau kejadian berbahaya sehingga mengancam atau berpotensi mengakibatkan kehilangan jiwa dan/atau kerusakan terhadap benda dan lingkungan.
3. *Vulnerability* (Kerentanan) adalah ketidakmampuan masyarakat, struktur, pelayanan atau kondisi geografi wilayah untuk mengurangi dampak kerusakan atau gangguan dari ancaman bahaya.

4. *Capacity* (Kapasitas) adalah sebagai sumber daya atau kekuatan yang dimiliki dalam masyarakat dan lingkungan yang memungkinkan untuk mencegah, mempersiapkan, mengatasi, dan memperbaiki apabila terjadi bencana.

2. Konsep Mitigasi

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada pasal 14 secara jelas disebutkan kegiatan mitigasi bencana selain diorientasikan kepada kegiatan fisik juga nonfisik (Priowidodo & Luik, 2013).

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Noor, 2014). Tujuan dari mitigasi sendiri adalah mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang, mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap penduduk, mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik (Dewi et al., 2021). Salah satu komponen terpenting dalam penanggulangan bencana adalah mitigasi bencana.

Mitigasi adalah dasar dari manajemen situasi darurat. Menurut Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), mitigasi didefinisikan

sebagai tindakan yang mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang dari bencana alam dan pengaruhnya terhadap orang dan properti. Mitigasi dilakukan oleh semua pihak terkait, termasuk pemerintah yang bertindak sebagai pembuat kebijakan (Policy Maker), dan pemangku kepentingan utama (stakeholder) (E. Lestari, 2019).

Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menangani tentang kebencanaan, tidak menutup kemungkinan untuk gerakan sosial lain dapat bermitra untuk tindakan cepat pada kejadian-kejadian luar biasa yang bersifat kebencanaan. Pemerintah merupakan penanggung jawab inti dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan gerakan sosial kebencanaan merupakan kekuatan luar biasa dalam pelaksanaan penanggulangan dan mitigasi bencana (Hawing, 2021).

Aksi mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan melalui beberapa hal yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya, tindakan mitigasi bencana tergolong menjadi dua bagian, yaitu mitigasi bencana pasif dan mitigasi bencana aktif. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Tindakan yang diklasifikasikan sebagai mitigasi pasif meliputi:

1. Menyusun undang-undang dan peraturan
2. Membuat peta rawan bencana dan memetakan masalah
3. Pengembangan pedoman/standar/prosedur
4. Membuat brosur/selebaran/poster

5. Penelitian atau studi karakteristik bencana
6. Penilaian atau analisis risiko bencana
7. Internalisasi penanggulangan bencana dalam muatan pendidikan local
8. Pembentukan organisasi atau satuan tugas bencana
9. Memperkuat unit sosial di masyarakat, seperti forum
10. Pengarusutamaan manajemen bencana dalam perencanaan pembangunan.

Sedangkan mitigasi aktif sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian dispensasi
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Bantuan ekonomi
4. Subsidi peralatan keamanan, materi bangunan yang lebih aman.
5. Penampungan dan penyimpanan
6. Peningkatan kesadaran dan penyebaran informasi untuk umum
7. Pembentukan organisasi-organisasi masyarakat.

Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak bencana yang dapat diambil sebelum bencana terjadi, termasuk kesiapsiagaan dan langkah-langkah pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi risiko yang

terkait dengan bahaya buatan manusia dan alam yang diketahui, dan proses perencanaan untuk menanggapi bencana yang sebenarnya (Minhar & Aco, 2021). Kesiapsiagaan dalam menangani banjir membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa yang perlu diambil ketika banjir terjadi. Keberhasilan dalam penanganan dan evakuasi saat banjir sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dan individu itu sendiri (Umar, 2013).

Kegiatan-kegiatan manajemen bencana (Khambali & ST, 2017):

1) Pencegahan (*prevention*) Pencegahan merupakan Upaya yang dilakukan untuk Mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya.

2) Mitigasi bencana (*mitigation*) mitigasi bencana adalah Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun Penyadaran dan tingkatan kemampuan menghadapi bencana (undang-undang Nomor 24 tahun 2007) Atau upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang akan ditimbulkan Oleh

bencana yang terjadi bentuk mitigasi yang pertama mitigasi struktural membuat chekdam, Bendungan, tanggul, sungai, Rumah tahan gempa dan lain-lain yang kedua mitigasi non struktural peraturan perundang-undangan Pelatihan dan lain-lain.

3) Kesiapsiagaan (*preparedness*) Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna misalnya Penyiapan sarana komunikasi pos komando penyiapan lokasi evakuasi Rencana kontingensi Dan sosialisasi peraturan pedoman penanggulangan bencana.

4) Peringatan dini (*Early Warning*) peringatan dini adalah serangkaian kegiatan Pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan akan terjadinya suatu bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang Atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana Kemungkinan akan segera terjadi Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat (*accessible*) segera (*Immediate*), Tegas tidak membingungkan(*coherent*) bersifat resmi (*official*).

5) Tanggap darurat (*Response*) Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan Segera pada saat terjadinya bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan Terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda evakuasi dan Pengungsian.

6) Bantuan darurat (*relief*) bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan dasar berupa tempat tinggal sementara seperti Pangan, sandang, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

7) Pemulihan (*recovery*) proses pemulihan darurat kondisi masyarakat Yang terkena terkena bencana dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana Seperti semula. upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan sarana seperti Jalan Listrik, air bersih, pasar, Puskesmas.

8) Rehabilitasi adalah langkah upaya yang diambil setelah terjadinya bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki Rumahnya fasilitas umum dan fasilitas sosial penting dan menghidupkan kembali roda perekonomian.

9) Rekonstruksi (*reconstruction*) merupakan program jangka menengah Dan jangka panjang guna memperbaiki fisik sosial dan ekonomi untuk mengembalikan Kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum terjadinya bencana dengan melihat manajemen

bencana sebagai Sebuah kepentingan masyarakat kita berharap berkurangnya korban jiwa Dan kerugian harta benda.

Hal terpenting dari manajemen bencana ini adalah merupakan langkah konkret dalam mengendalikan bencana sehingga Korban yang kita harapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat. Pengendalian itu dimulai dengan membangun

kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah atas masalah bencana alam Menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana penegasan untuk Lahimya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk Peraturan negara peraturan daerah atas manajemen bencana hal yang tak kalah penting Dalam manajemen bencana ini adalah sosial sosialisasi kehati-hatian Kehati-hatian pada daerah terutama pada daerah rawan bencana.

3. Konsep Bencana Banjir

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam serta faktor manusia yang mengakibatkan munculnya hilangnya nyawa manusia, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis. Bencana adalah pertemuan tiga elemen, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh Insiden (INDONESIA, 24 C.E.). Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian material, dan korban manusia (Jamil & Togubu, 2016). Jenis-jenis bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah

1. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam atau serangkaian peristiwa, yang meliputi kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar masyarakat, dan teror.

Banjir didefinisikan sebagai gerangan suatu tempat karena luapan air yang melebihi kapasitas pembuangan air di daerah tertentu wilayah dan menyebabkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Andri, 2021). Banjir biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal. Akibatnya, sistem drainase air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alami serta saluran drainase dan sistem saluran drainase bagian banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kapasitas/kapasitas sistem drainase air tidak selalu sama, tetapi berubah karena sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan buatan manusia, sampah tersumbat dan hambatan lainnya

(Sebastian, 2008). Bencana banjir terjadi, semua kegiatan akan dilakukan dalam keadaan darurat kondisi kacau, sehingga diperlukan perencanaan, koordinasi, dan pelatihan yang baik agar penanganan dan evakuasi banjir berlangsung dengan baik (Anjarsari, n.d.).

Bencana banjir juga terbagi atas tiga yaitu : *Banjir Kilat*, banjir ini biasanya hanya terjadi sekitar 6 jam setelah hujan lebat. Banjir kilat ini mempunyai durasi waktu yang sangat cepat sehingga dibutuhkan sistem peringatan yang cepat dan tepat untuk segera mengevakuasi masyarakat di lokasi yang terdampak. *Banjir Luapan Air*, banjir ini biasanya bersifat musiman dan tahunan dan biasanya berlangsung selama sehari-hari atau berminggu-minggu tanpa berhenti. *Banjir Pantai*, Banjir pantai merupakan banjir yang terjadi akibat kapan air hujan yang dipacu oleh angin kencang sepanjang pantai.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana *Risk* (Resiko), *Hazard* (Ancaman/Bahaya), *Vulnerability* (Kerentanan), serta *Capacity* (Kapasitas). Keempat terminologi dalam kebencanaan ini mempunyai hubungan satu sama lain dan dapat digunakan untuk mengetahui besaran ancaman dan dampak sebuah bencana yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

8. *Risk* (Resiko) Diketahui bahwa besaran resiko ditentukan oleh besar kecilnya ancaman dan kerentanan yang di bagi dengan

kapasitas. Sebelum melakukan tindakan pengurangan resiko maka perlu di ketahui jenis, besaran, kerugian, dan waktu terjadinya ancaman yang mungkin akan terjadi.

2. *Hazard* (Ancaman/Bahaya) Merupakan hal yang perlu diketahui sebelum melakukan tindakan terhadap management bencana. Hal ini dilakukn untuk menemukan jenis dan karakteristik dari ancaman bahaya yang akan terjadi sehingga dapat disusun perencanaan dan penanggulangan bencana yang tepat dan efektif.

3. *Vulnerability* (Kerentanan) adalah ketidakmampuan masyarakat, struktur, pelayanan atau kondisi geografi wilayah untuk mengurangi dampak kerusakan atau gangguan dari ancaman bahaya, semakin tinggi tingkat kerentanan maka semakin tinggi pula ancaman bahaya yang akan ditimbulkan. Dalam menghadapi keadaan seperti bencana alam di Kabupaten Jeneponto tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa ditangani seperti kerusakan-kerusakan dan ancaman-ancaman bencana susulan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tentu harus lebih sigap dalam mencari solusi dari permasalahan- permasalahan tersebut.

4. *Capacity* (Kapasitas) adalah sebagai sumber daya atau kekuatan yang dimiliki dalam masyarakat dan lingkungan yang memungkinkan untuk mencegah, mempersiapkan, mengatasi, dan memperbaiki apabila terjadi bencana di beberapa wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian. Beberapa jenis kapasitas antara lain, *Kapasitas Fisik, Kapasitas Sosial, Kapasitas Kelembagaan, Dan Kapasitas Ekonomi*. Semakin tinggi tingkat kapasitas maka

semakin rendah ancaman bahaya yang akan diterima.

Dari keempat terminologi dalam kebencanaan diatas mempunyai hubungan satu sama lain dan dapat digunakan untuk mengetahui besaran ancaman dan dampak dari sebuah bencana. Lebih penting lagi dapat mengukur sejauh mana dan sebaik apa suatu masyarakat dapat merespon bencana yang akan terjadi nantinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian ini adalah dilakukan selama dua bulan atau setelah adanya perizinan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas, lokasi penelitian dilaksanakan pada tiga titik lokasi di Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Kecamatan Rumbia, Tarowang dan Binamu.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini mengumpulkan data secara bentuk kata-kata dan gambar. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sampai perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (D. Sugiyono, 2013). Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) (Gunawan, 2013).

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang mengharuskan adanya pendeskripsian utuh dan menyeluruh terhadap informasi yang akan diperoleh di lapangan. Dari pendeskripsian yang menyeluruh tersebut akan membentuk sebuah kesimpulan yang dapat diarik sehingga peneliti mampu menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah asal data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menjawab problem yang muncul pada penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer. Meskipun sebagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga tidak boleh dianggap tidak penting, karena tanpa adanya data sekunder data primer akan patut dipertanyakan keabsahannya.

D. Informan Penelitian

Dalam memilih informan penelitian penulis menggunakan teknik Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik sampling yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling adalah teknik sampling dengan menentukan kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Purposive sampling yang juga dikenal sebagai assessment atau sampel ahli adalah jenis sampel non-probabilitas. Dimana penulis memilih orang-orang yang dianggap mampu memberikan Informasi yang tepat terhadap penelitian yang dilakukan yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

INFORMAN
BPBD Kabupaten Jeneponto
Pemerintah Kecamatan dan desa
Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang di dapatkan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan Bencana banjir di Jeneponto.
2. Wawancara, adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan berupa tanya jawab. Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik kemudian memberikan jawaban yang dikehendaki sampai tujuan wawancara tercapai.
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar. Dalam melakukan wawancara tidak jarang dibuat rekaman video dan audio yang dapat digunakan untuk menangkap isi pembicaraan dan menggali isi lebih dalam pada saat pengolahan data dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Proses dalam mencari juga menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori lalu memaparkannya dalam bentuk unit yang penting dan diberi kesimpulan agar dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (M. Sugiyono, 2007). Analisis ini dilakukan dengan mencari data-data mengenai Bencana Banjir Yang terjadi di kabupaten Jeneponto. Proses analisis pun dimulai dengan cara menelaah seluruh

data yang tersedia dari berbagai sumber yang ada di lokasi penelitian (Arikunto, 2010).

Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu proses pencarian dan kemudian menyusun secara runtut atau sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil pencarian di lokasi penelitian kemudian memaparkan data lalu menarik sebuah kesimpulan tersebut (Jogiyanto Hartono, 2018).

G. Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu penulis melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu penulis dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menghubungi kembali para informan dan pengumpulan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Meningkatkan ketekunan: melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi: pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan banyak waktu. Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan kondisi yang terjadi di lokasi sebelum dan sesudah terjadinya bencana banjir di kabupaten jenepono

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km² dan secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 (70.652 ha), dan RT RW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit (79.953 ha) menampilkan data yang berbeda.

Namun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas wilayah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas wilayah tersebut maka kedepannya diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Dalam Negeri dan Bakorsurtanal.

Kabupaten Jeneponto secara administrative berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar sebelah Utara, sebelah Selatan dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah

Timur dengan Kabupaten Bantaeng. Secara administrative Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan dan 82 (delapan puluh dua) desa. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,96 km² atau 20,40 % dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km atau 3,99 % dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan desa / kelurahan terluas adalah Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat dengan luas 44 km² dan desa / kelurahan luas wilayah terkecil adalah Desa Pa'rasangang Baru Kecamatan Turatea dengan luas 1,57 km².

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas(Ha)	Luas(Km ²)	Luas(%)
1	Bangkala	13.095,34	130,95	16,34
2	bangkalaBarat	16.454,74	164,55	20,53
3	Tamalatea	6.554,20	65,54	8,18
4	Bontoramba	9.571,90	95,71	11,95
5	Binamu	6.743,04	67,43	8,41
6	Turatea	5.867,89	58,68	7,32
7	Batang	3.104,99	31,05	3,87
8	Arungkeke	3.244,27	32,44	4,05
9	Tarowang	4.297,86	42,98	5,36
10	Kelara	4.917,80	49,18	6,14
11	Rumbia	6.280,77	62,81	7,84
Total Luas		80.132,80	801,32	100

(Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto 2018)

Berdasarkan table 4.1 luas kabupaten Jeneponto 801,32 kilo meter dimana wilayah terluas adalah Bangkala Barat 164.55 Km dan wilayah terkecil kecamatan Batang 31.05 Km. Secara keseluruhan terdapat 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019

No	Tahun	JumlahPenduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2015	171,882	183,717	355,599
2	2016	172,894	184,913	357,807
3	2017	173,771	186,016	359,787
4	2018	174,682	187,111	361,793
5	2019	175,607	188,185	363,792

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Jeneponto, 2018

2. BPBD (Badan PenanggulanganBencana Daerah) Kabupaten Jeneponto

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Lembaga pemerintahan Non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

a. Laporan Kejadian bencana Banjir Kecamatan Binamu

Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah daerah yang rawan banjir dan tanah longsor karena beberapa DAS melewati beberapa seperti sungai Allu, sungai Tamanroya, Sungai Belokallong, Sungai Bululoe, dan Sungai Tarowang. Sejak hari selasa 22 Januari 2019 pukul 13:30 Wita terjadi hujan lebat secara terus menerus di Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto dan daerah tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jeneponto yang mengakibatkan tanggul sungai jebol dan meluap sehingga menimbulkan banjir bandang di beberapa kecamatan. Langkah-Langkah Penanganan Darurat Telah dilaksanakan :

- a. Melakukan Evakuasi Korban di wilayah Bencana.
- b. Membuat Surat Keputusan Bupati Tentang Tanggap Darurat
- c. Melakukan Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana.
- d. Koordinasi antara pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam hal ini TRC BPBD, TNI, POLRI, OPD Teknis dan Warga Masyarakat dengan mengumpulkan informasi korban bencana banjir.

Sesuai Protap Operasi SAR pencarian dan pertolongan dilakukan selama 7 hari tetapi dengan rasa kemanusiaan Tim SAR gabungan melakukan Operasi SAR selama 11 Hari dari tanggal 22/1/2019 s/d 1/2/2019 dan selanjutnya dilakukan pemantauan.

Tabel korban jiwa :

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (jiwa)				MD
			Hilang	L.Berat	L.Ringan	Pngungsi	
1.	Binamu	Kel.BalangBeru, Balang, Marro-Morro, Pabiringa Desa Sapanang					14

Tabel 4.6 Data korban jiwa Kecamatan Binamu

b. Laporan Kejadian bencana Banjir Kecamatan Rumbia

Karena intensitas hujan yang tinggi sejak Kamis 11 Juni 2020 pagi sampai Jumat malam tanggal 12 Juni 2020 di Kabupaten Jeneponto yang menyebabkan beberapa pasungai di wilayah Kabupaten Jeneponto meluap dan mengakibatkan banjir dan tanahlongsor yang berdampak di beberapa wilayah kecamatan, sehingga beberapa anaksungai debit airnya meluap yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang berdampak jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, social ekonomi produktif masyarakat serta harta benda.

Tabel Korban Jiwa :

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (jiwa)				
			Hilang	L.Berat	L.Ringan	Pugungsi	MD
1.	Rumbia	DesaLebanganmanai, DesaRumbia, DesaLebanganmanai Utara	-	4	-	235 jiwa (50 KK)	4

Tabel 4.7 Data korban jiwa Kecamatan Rumbia

UPAYA

1. Bupati Jeneponto telah menetapkan Status Tanggap Darurat Nomor : 360/271/2020 Mulai Tanggal 13 s.d 26 Juni 2020 (14 hari) dan menetapkan posko induk Kabupaten ditempatkan di Kecamatan Rumbia sebagai Posko Pencarian dan daerah longsor.
2. BPBD bersama Dinas PU, TNI Polri dan masyarakat telah melakukan pembersihan pada akses jalan provinsi dan daerah yang tertimbun oleh longsor
3. BPBD Bersama Basarnas dan relawan telah melakukan pencarian korban dan melakukan evakuasi terhadap korban yang telah ditemukan.
4. Pemerintah setempat telah melakukan edukasi dan evakuasi kepada masyarakat yang berada di daerah bencana rawan longsor agar tidak membangun pemukiman di daerah yang masih berpotensi terjadinya longsor.
5. BPBD Bersama Pemerintah setempat dan relawan telah melakukan distribusi pemenuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya pembuatan dapur umum, sembako dan kebutuhan air bersih.

6. Dinas Kesehatan telah melaksanakan tromahiling terhadap masyarakat terdampak bencana
7. BPBD Bersama masyarakat setempat telah melakukan rehabilitasi pipa distribusi air yang rusak akibat tertimbun longsor, agar pemenuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi kembali.
8. BPBD dan Dinas terkait masih melaksanakan assesment data kerusakan pasca bencana di beberapa wilayah kecamatan terdampak.

KENDALA

1. Wilayah terdampak tersebar di 8 Kec. dengan jarak 5-30 km, dan Wil. Kec. Terparah yaitu Rumbia, sehingga penanganan terpusat di Rumbia
2. Keterbatasan peralatan dan sarana pendukung baik personel maupun tim u/ penanganan milik BPBD minim, sehingga proses penanganan kami dibantu oleh TNI, Polri, Basarnas, Relawan dan masyarakat terdampak.

Lain – lain

1. Tim dari Kedeputan Bidang Penanganan Darurat BNPB telah tiba di Kabupaten Jenepono pada tanggal 20 juni 2020 dan langsung melakukan koordinasi dengan BPBD dalam rangka membantu dalam penanganan sumber daya serta kelokasi terdampak, guna melakukan assesment terhadap beberapa kerusakan infrastruktur pasca bencana.
2. Telah dilakukan lidas untuk kerusakan, kerugian dan kebutuhan, baik pemukiman maupun sarpras infrastruktur yang sangat prioritas yang berdampak langsung kepada warga, yang di lakukan oleh Tim BNPB, BPBD, dan PUPR.

c. Laporan Kejadian Bencana Banjir Kecamatan Tarowang

Karena intensitas hujan yang tinggi sejak rabu 7 juli 2021 rabu malam sampai tanggal 8 juli 2021 di Kabupaten Jeneponto yang menyebabkan beberapa sungai di wilayah Kabupaten Jeneponto meluap dan mengakibatkan banjir yang berdampak di beberapa wilayah kecamatan, sehingga beberapa anak sungai debit airnya meluap yang mengakibatkan banjir dan berdampak pada kerusakan infrastruktur, sosial ekonomi produktif masyarakat serta harta benda.

Tabel Korban Jiwa :

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (jiwa)				
			Hilang	L. Berat	L. Ringan	Pagungsi	MD
1.	Tarowang	Desa Tarowang	-	-	-	-	-

Tabel 4.8 Data korban jiwa Kecamatan Tarowang

Kerusakan pada sector permukiman masyarakat mengakibatkan 13 unit rumah Rusak Berat dan 43 rumah Rusak ringan, sementara itu fasilitas pemerintah mengalami kerusakan sebanyak 5 unit dan transportasi mobil 2 unit dan motor 8 unit dan pada sector ekonomi produktif pertanian juga mengalami kerusakan kebun dan sawah.

UPAYA

1. BPBD Kabupaten Jeneponto telah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

2. BPBD Bersama pemerintah setempat dan relawan telah melakukan distribusi pemenuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya memberikan kebutuhan yang mendesak seperti makanan siap saji, obat-obatan, family kit, sembako dan kebutuhan air bersih.
3. BPBD dan Dinas terkait masih melaksanakan assessment data kerusakan pasca bencana di beberapa wilayah Kecamatan terdampak.

KENDALA

1. Keterbatasan peralatan dan sarana pendukung baik personel maupun tim untuk penanganan milik BPBD minim, sehingga proses penanganan kami dibantu oleh TNI, Polri, Basarnas, Relawan dan masyarakat terdampak.

B. Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Manajemen Bencana merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Cara bekerja Manajemen Bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap siklus kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari (ancaman) bencana.

Dalam setiap bencana tentunya perlu yang namanya penanggulangan bencana agar lebih meminimalisir terjadinya bencana secara terus menerus. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (P. Lestari, 2018). Penanggulangan bencana memerlukan sebuah pengaturan tentang penataan ruang dan harus berbasis mitigasi bencana (Tondobala, 2012). Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 (Islam, 2021).

Berkaitan dengan itu, hal tersebut merupakan upaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dengan serta mengurangi dampak dari bencana seperti kerusakan lingkungan, jatuhnya korban, serta kerugian harta benda. Peristiwa bencana selain dapat menelan korban jiwa dan merugikan secara materi, juga akan berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan yang menguasai hajat hidup orang banyak di suatu daerah.

Hasil observasi awal penulis manajemen bencana banjir berbasis mitigasi di Kabupaten Jeneponto masih kurang maksimal, dapat dilihat dari beberapa titik lokasi bencana banjir masih kurang pencegahan terhadap bencana banjir yang akan dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, pemerintah lebih berfokus kepada penanganan pasca bencana banjir itu terjadi.

Pencegahan dan penanganan bencana banjir berbasis mitigasi di Kabupaten Jeneponto tidak hanya dilakukan oleh badan penanggulangan bencana akan tetapi masyarakat dan beberapa komunitas juga ikut andil dalam penanganan pasca bencana seperti penanaman pohon di hulu sungai untuk menjaga ekosistem lingkungan.



Gambar 4.1 Kegiatan penanaman pohon oleh karang taruna

Pencegahan dan penanganan bencana banjir berbasis mitigasi yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana lebih berfokus pada pembangunan tanggul pada sekitaran aliran sungai guna untuk mencegah air sungai memasuki pemukiman masyarakat, namun ada juga beberapa masalah yang tidak diperhatikan oleh pemerintah yang kerap menjadi permasalahan utama terjadinya banjir bandang di Kabupaten Jeneponto. Untuk itu melalui penelitian ini penulis ingin melihat beberapa permasalahan yang terjadi baik dari lingkungan maupun social masyarakat yang mempengaruhi kondisi

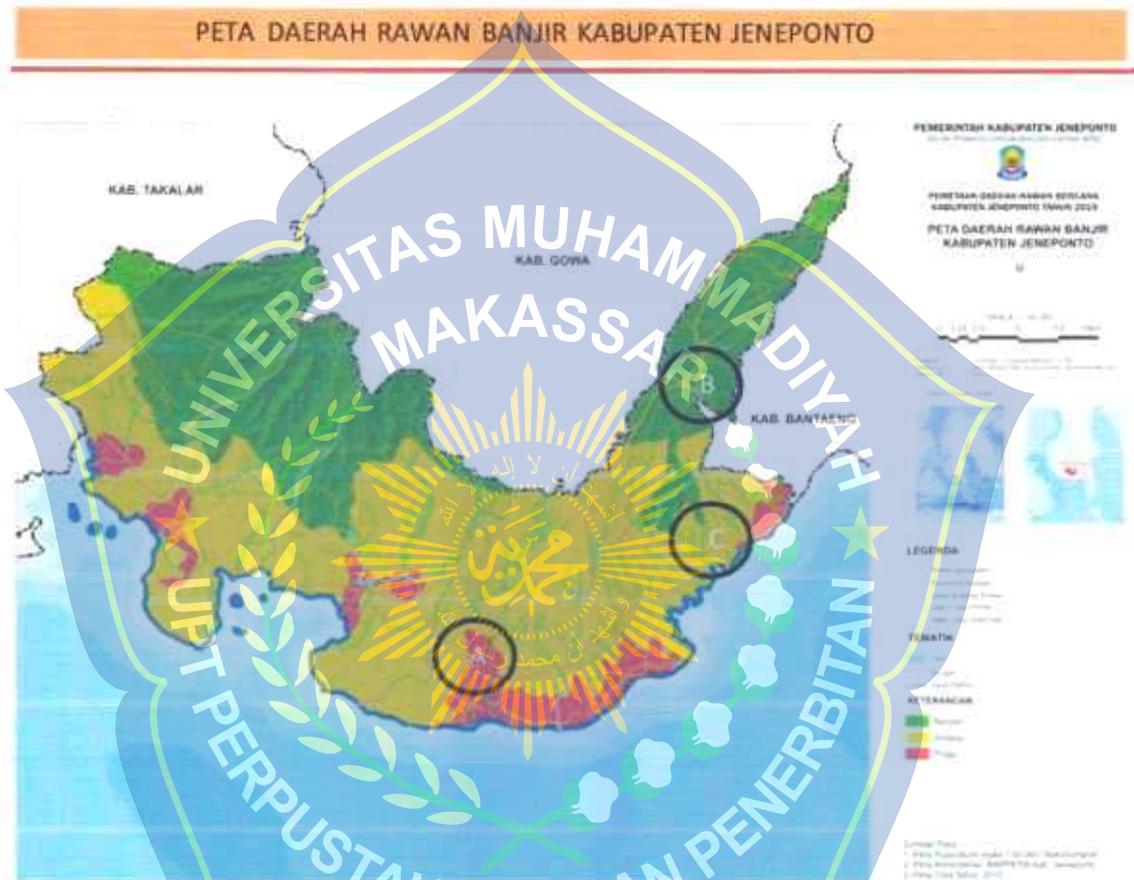
ekonomi masyarakat maupun keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan dibahas sebagai berikut:

1. *Risk* (risiko)

Risiko adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari kehidupan dan mempengaruhi setiap manusia di manapun, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, orang dewasa dan anak kecil. Setiap pilihan yang diputuskan oleh individu dan masyarakat melibatkan faktor risiko yang sering kali tidak disadari dan tidak dapat dihindari.

Peta rawan bencana banjir Kabupaten Jeneponto bagian A. merupakan wilayah kecamatan Binamu dan ditunjukkan bahwa pada wilayah ini memiliki risiko bencana banjir yang sangat tinggi. Sementara pada gambar bagian B. merupakan wilayah Kecamatan Rumbia dengan tingkat risiko bencana banjir yang rendah karena pada wilayah ini merupakan daerah pegunungan sehingga risiko banjir itu kurang. Pada gambar bagian C. pada

peta rawan bencana banjir Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah kecamatan tarowang dengan tingkat risiko bencana banjir sedang.



Gambar 4.2 Peta Rawan Bencana Kab. Jeneponto

Risiko bencana banjir dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah factor letak geografis suatu wilayah sehingga bencana banjir tidak dapat dihindari. Diketahui bahwa besar risiko ditentukan oleh besar kecilnya ancaman dan kerentanan yang dibagi dengan kapasitas. Sebelum melakukan Tindakan pengurangan risiko maka perlu diketahui jenis, besaran, kerugian, dan waktu terjadinya ancaman yang mungkin akan terjadi. Misalnya, taksiran kerugian yang disebabkan oleh ancaman yang terjadi di Kawasan tertentu dengan periode waktu tertentu.

Konsep dasar pengurangan risiko :
Ancaman/Bahaya X Kerentanan

Risiko = _____

Kapasitas

Dampak suatu bencana diukur berdasarkan jumlah korban jiwa, kerusakan, atau kerugian yang dimbulkannya. Risiko suatu bencana ditentukan oleh variabel-variabel diatas yaitu ancaman/bahaya, kerentanan dan kapasitas.

a. Kecamatan Binamu

DAS atau Daerah Aliran Sungai adalah suatu Kawasan fisik permukaan bumi yang menentukan kemana arah aliran dan ter akumulasinya air yang ada. Air hujan yang turun dipermukaan bumi akan terakumulasi pada suatu system pengumpulan air ke sungai utama dari sungai-sungai kecil yang ada, dengan batas berupa pegunungan yang ada di sekelilingnya.

Tentunya berbagai macam penggunaan lahan, ekosistem alam, flora dan fauna, hingga demografi kependudukan didalam suatu system DAS akan saling mempengaruhi. Dengan demikian, lokasi pemukiman padat penduduk menjadi objek penting yang harus dikenali kaitannya dengan antisipasi dan kewaspadaan terhadap terjadinya banjir. Ketika masyarakat mampu memahami lokasi dimana mereka tinggal, maka Langkah-langkah preventif maupun represif terhadap banjir dapat dilakukan dengan tepat.

Masyarakat sekitar aliran sungai harus menyadari risiko yang akan di hadapi, karena tidak menuntut kemungkinan bencana banjir bandang dapat

saja terjadi karena beberapa faktor salah satunya factor alam, seperti curah hujan yang meningkat dan penumpukan sedimen tanah pada aliran sungai sehingga rentan terjadi banjir, apalagi jika di tambah dengan penumpukan sampah yang dapat memperlambat aliran sungai.

“ Salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat Desa Sapanang Kecamatan Binamu adalah pemukiman warga yang berada di sekitaran aliran sungai yang sewaktu-waktu dapat meluap akibat curah hujan yang tinggi dan penumpukan sedimen tanah yang menyebabkan mendangkalnya aliran sungai sehingga air sungai cepat meluap setiap kali memasuki musim hujan ” (wawancara dengan sekretaris desa sapanang 10 mei 2022).

Hal ini terkait dengan teori yang digunakan bahwa risiko bisa berasal dari alam atau factor geografis suatu wilayah, dimana pemukiman masyarakat dibuat tepat berada pada bantaran aliran sungai sehingga risiko bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan kondisi tersebut sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa sungai allu merupakan salah satu sungai besar yang berada di Kabupaten Jeneponto sehingga sungai ini menjadi titik sentral berkumpulnya air dari berbagai anak sungai.

Perlunya informasi dan komunikasi dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam masyarakat dan pemerintah atau pihak terkait lainnya agar risiko bencana yang akan terjadi dapat diminimalisir oleh masyarakat. Informasi yang valid sangat dibutuhkan dalam upaya antisipasi masyarakat dalam menghadapi suatu bencana, namun pada kasus banjir bandang di Desa Sapanang mengalami diskomunikasi dengan pihak bendungan karalloe seperti yang dikatakan masyarakat pada wawancara dengan informan :

“Menurut informasi yang beredar di masyarakat mengatakan bahwa bendungan karaloe yang pada saat itu sedang dalam tahap pembangunan mengalami jebol karena intensitas hujan yang sangat tinggi namun tidak ada informasi dari pihak bendungan karaloe ke masyarakat dataran renda khususnya pada wilayah DAS sehingga masyarakat hanya mengira bahwa banjir yang terjadi hanya banjir yang biasa terjadi pada saat musim hujan, karena pada wilayah ini merupakan wilayah langganan banjir “ (wawancara dengan masyarakat desa sapanang 10/05/2022).

Hubungan antara informasi dari bendungan karaloe dan letak geografis pemukiman penduduk menyebabkan risiko ancaman bahaya pada masyarakat sangat tinggi. Kondisi lingkungan hidup masyarakat juga sangat mempengaruhi risiko yang akan di hadapi terlebih lagi jika masyarakat tidak memperhatikan lingkungannya dengan membangun daerah pemukiman disekitaran aliran sungai yang dapat menghambat aliran sungai sehingga ketika musim penghujan dan volume air sungai bertambah dan terjadilah bencana banjir seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir ini.



Gambar 4.3 Permukiman warga sekitaran aliran sungai

b. Kecamatan Rumbia

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu wilayah pegunungan yang ada di Kabupaten Jeneponto yang juga di terjang banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda. Ancaman bahaya di bagian hulu DAS tidak lepas dari adanya lereng yang curam, kerapatan vegetasi yang rendah, serta aliran air di permukaan tanah akibat infiltrasi rendah yang memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, dan Gerakan tanah berlumpur. Jika terdapat permukiman penduduk di area hulu DAS ini, masyarakat setempat perlu waspada. Sebaiknya sudah siap dengan Tindakan pencegahan maupun Langkah penyelamatan jika tanda-tanda bahaya tersebut mulai terjadi

“Salah satu risiko yang di hadapi masyarakat Desa Rumbia yaitu lokasi pemukiman warga yang berada tepat dibawah kaki bukit yang sewaktu-waktu dapat terjadi longsor apabila terjadi hujan lebat, apalagi pemukiman warga juga berada pada wilayah daerah aliran sungai sehingga meningkatkan risiko yang akan di hadapi oleh masyarakat, (wawancara dengan kepala desa rumbia 09/05/2022)”.

Sehubungan dengan itu wilayah pemukiman warga yang berada pada sekitaran kaki bukit tersebut membutuhkan dinding penahan tanah berupa pembuatan trasering agar aliran air dari sawah yang di bangun masyarakat di atas gunung tidak merusak ekosistem dan tidak menimbulkan terjadinya bencana tanah longsor.

“Tidak adanya bendungan yang dibangun pada aliran sungai lereng bukit untuk mengatur debit air sehingga air sungai dapat terkontrol dengan baik. Dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi khawatir Ketika memasuki musim hujan jika bendungan telah dibuat pada aliran sungai lereng bukit”

Dikatakan jarangyanya terjadi bencana banjir di kecamatan rumbia sehingga masyarakat kurang waspada dalam penanganan bencana banjir tersebut, itupun banjir akan terjadi jika curah hujan sangat lebat/deras sehingga aliran air dari hulu mengalir dengan deras. Kondisi ini yang menyebabkan meningkatnya risiko ancaman bencana pada masyarakat karena menganggap bahwa wilayahnya tidak akan terkena bencana banjir.

Berdasarkan teori yang digunakan kondisi seperti ini yang sering menjadi penyebab dari terjadinya bencana banjir karena kurangnya perhatian terhadap hal-hal kecil yang sering di anggap sepele dan kurang mendapat perhatian oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Pencegahan yang dilakukan juga masih sangat kurang karena melihat dari titik lokasi bencana masih belum memiliki system penahan air yang cukup untuk menahan debit air pada saat memasuki musim penghujan.

c. Kecamatan Tarowang

Kecamatan tarowang merupakan wilayah hilir sungai yang juga menjadi langganan banjir di Kabupaten Jeneponto, penyebab banjir seperti kurangnya tutupan lahan juga terjadi di bagian sungai ini. Selain itu lahan hijau yang dikonversi menjadi bangunan atau jalan tidak bias menyerap air lalu dapat memperparah banjir yang terjadi.

Pemahaman masyarakat yang tinggal di bagian hilir DAS terhadap bahaya banjir kiriman dari bagian hulu dan tengah DAS perlu ditingkatkan. Selain menggali informasi terkait dengan adanya curah hujan yang tinggi pada Kawasan di atasnya, masyarakat juga dapat merencanakan Kawasan

pemukimannya dengan berbagai Langkah preventif maupun represif. Mulai dari mengenali ketinggian tempat tinggalnya dibanding dengan tempat lain, mengenali karakteristik tanah yang mudah ataupun sulit meresap air, menyediakan ruang peresapan air, dan juga menentukan jalur evakuasi tercepat jika terjadi banjir. Upaya tersebut ditempuh agar risiko kerugian akibat banjir dapat diminimalisasi.

“Penyebab banjir ini berkorelasi dengan penyebab banjir berikutnya, yaitu drainase. Drainase yang terganggu menghambat aliran air, sehingga dapat menjadi penyebab banjir. Terganggunya drainase ini selain disebabkan oleh kurangnya tutupan lahan bisa juga disebabkan oleh banyaknya sampah, gorong-gorong yang tidak dibersihkan, dan drainase yang buruk. (wawancara dengan kepala desa tarowang 10/05/2022)

Sehubungan dengan itu faktor inilah yang kemudian menjadi risiko yang di hadapi oleh masyarakat di Desa Tarowang seperti terganggunya drainase yang disebabkan oleh sampah yang memperlambat aliran sungai, dan gorong-gorong yang tidak dibersihkan oleh masyarakat itu sendiri.

2. *Hazard* (Ancaman/Bahaya)

Ancaman atau bahaya merupakan suatu kondisi atau kejadian yang berbahaya sehingga mengancam atau berpotensi mengakibatkan kehilangan jiwa atau harta benda maupun kerusakan lingkungan hidup. Ancaman atau bahaya juga merupakan tingkatan kedua setelah risiko, semakin besar suatu risiko yang dihadapi semakin besar pula ancaman bahaya yang akan diterima Ketika terjadi suatu bencana.

Dampak Bencana yang terjadi karena kondisi yang rawan sangat berpotensi menjadi bahaya. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam

pengambilan tindakan mitigasi adalah menilai bahaya tersebut. Penilaian bencana bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat, tingkat kekerasan dan frekuensi bahaya, daerah yang mungkin terkena serta waktu dan lamanya dampak terjadi

Gambar 4.4 Gambaran Ancaman yang dihadapi



Pada gambar a. digambarkan adanya suatu ancaman yaitu batu besar bundar diatas bukit yang siap setiap saat dapat jatuh bila ada penyebabnya (angina tau lainnya). Dengan demikian, manusia dibawahnya menghadapi suatu risiko.

Secara umum bahaya bencana dapat ditimbulkan oleh berbagai factor antara lain bahaya yang disebabkan oleh alam dan yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Bahaya yang disebabkan oleh factor alam meliputi, bahaya geologi, bahaya hidrologi, bahaya meteorologi dan bahaya klimatologi.

a. Kecamatan Binamu

Ancaman atau bahaya yang dihadapi masyarakat Kecamatan Binamu pada saat terjadinya bencana seperti kehilangan rumah dan harta benda, bahkan kehilangan harta benda dan trauma pasca bencana terjadi.

“Bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Sapanang pada tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 14:00 wita terjadi akibat hujan lebat yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan tanggul jebol dan meluap sehingga menimbulkan banjir bandang pada wilayah daerah aliran sungai dengan 14 orang meninggal dunia dan 1 orang hilang pada bencana banjir bandang tersebut (wawancara dengan pemerintah desa Sapanang 10/05/2022)”

Data korban jiwa dari BPBD Kab. Jenepono

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (jiwa)				MD
			Hilang	L.Berak	L.Ringan	Pngungsi	
1.	Binamu	Kel.BalangBeru, Balang Monro-Monro, Pabiringa Desa Sapanang	1	-	-	-	14

Tabel 4.3 Data korban jiwa Kecamatan Binamu

Berdasarkan teori yang digunakan bencana hidrometeorologi sangat dipengaruhi oleh faktor ekosistem DAS, kualitas ekosistem DAS akan memberikan kontribusi terhadap besar atau kecilnya potensi bahaya bencana hidrometeorologi. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terganggunya ekosistem DAS menjadi pemicu utama bencana. DAS alluvial dan taman royam menjadi salah satu daerah aliran sungai di Kecamatan Binamu memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas makhluk hidup pada sepanjang aliran sungai.

Sementara itu “Desa Sapanang merupakan wilayah langganan banjir setiap kali memasuki musim hujan, hal ini yang mestinya menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat mengancam keselamatan masyarakat dan

merugikan masyarakat sekitar daerah aliran sungai tersebut” (wawancara dengan masyarakat desa sapanang 10/05/2022).

Sehubungan dengan keterkaitan dengan teori yang digunakan hal tersebut yang menjadi ancaman bagi masyarakat Desa Sapanang yang sewaktu-waktu dapat terjadi bencana banjir akibat dari penumpukan sedimen tanah yang membuat aliran sungai menjadi dangkal sehingga air sungai sangat mudah meluap kepermukiman warga. Ancaman ini juga dapat di sebabkan oleh beberapa factor yaitu factor alam dan factor kelalaian manusia.

Dampak dari kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas debit air sungai fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selanjutnya juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Dampak yang kemudian dirasakan adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Kerusakan DAS mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai yang mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh erosi lahan kritis, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian (perkebunan).

b. Kecamatan Rumbia

Ancaman/bahaya yang dihadapi masyarakat Rumbia yaitu longsor dan banjir bandang yang menerjang Kecamatan Rumbia Tepatnya di desa rumbia yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 4 orang luka berat dan merusak beberapa rumah dan beberapa infastruktur yang ada.

Table korban jiwa dari BPBD Kab. Jeneponto :

No	Kecamatan	Kel/Desa	Jumlah (jiwa)				
			Hilang	L.Berat	L.Ringan	Pngungsi	MD
1.	Rumbia	DesaLebanmanai, DesaRumbia, DesaLebanmanai Ulara	-	4	-	235 jiwa (50 KK)	4

Tabel 4.4 Data korban jiwa Kecamatan Rumbia

“ Bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia terjadi pada malam sabtu jam 09:30 tanggal 2 juni 2020 akibat curah hujan yang sangat tinggi lebih dari musim hujan sebelumnya, hujan ini berlangsung selama tiga hari tanpa henti sehingga menyebabkan tanah yang berada di bukit jadi gembur sehingga rawan terjadi longsor (Wawancara dengan Masyarakat Desa Rumbia 09/05/2022)”

Sementara itu bencana longsor yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi di Desa Rumbia menyebabkan aliran sungai tertutup oleh tanah longsor yang mengakibatkan tiga rumah tertimbun longsor, dan tanah longsor tersebut menyebabkan air di aliran sungai tersebut meluap kepermukiman warga yang mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah warga sekitar aliran sungai.

Permasalahan yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) ini tidak luput dari aktivitas di hulu. Adanya aktivitas yang terjadi pada bagian hulu DAS akan memengaruhi kondisi suatu daerah aliran sungai secara keseluruhan terutama wilayah di bagianhilir. Sebagian besar kondisi DAS dengan keadaan lingkungan terdegradasi dimana keadaan tersebut disebabkan oleh terjadinya perubahan penggunaan lahan di daerah hulu DAS

dari Kawasan konservasi hutan menjadi penggunaan perkebunan, pertanian dan permukiman sehingga terjadi peningkatan laju erosi dan sedimentasi.

c. Kecamatan Tarowang

Karena intensitas hujan yang tinggi sejak Rabu 7 Juli 2021 rabu malam sampai tanggal 8 Juni 2021 menyebabkan beberapa sungai meluap dan mengakibatkan banjir yang berdampak di Kecamatan Tarowang. Bencana banjir yang terjadi berdampak pada kerusakan infrastruktur, sosial ekonomi produktif masyarakat serta harta benda mereka ikut terdampak oleh bencana banjir tersebut.

“ Bencana banjir bandang yang terjadi mengakibatkan 13 rumah warga mengalami kerusakan parah dan 43 rumah warga rusak ringan, puskesmas dan sekolah dasar juga ikut mengalami kerusakan sedangkan pada sector ekonomi produktif masyarakat seperti sawah dan kebun juga terkena dampaknya sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar, (wawancara dengan Masyarakat desa tarowang 19/05/2022)”

Table jumlah kerusakan dan kerugian dari pemerintah desa :

No.	Alamat	Status Kerusakan Rumah		Estimasi kerugian
		Berat	Ringan	
1.	Tarowang	14 Unit	43 Unit	Rp.3.002.500.000

Tabel 4.5 Data kerugian banjir bandang Kecamatan Tarowang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat kita lihat bahwa kondisi seperti ini sangat berpengaruh dan berbahaya bagi masyarakat, ancaman serupa sewaktu waktu dapat terjadi lagi apabila tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah. Masyarakat juga ikut bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut karena kurang memperhatikan dampak dari

perbuatan mereka seperti membuang sampah pada aliran sungai dan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Adanya kecenderungan probalitas lebih banyaknya hujan di wilayah hulu dapat menjadi salah satu indikasi perlunya perhatian pengelolaan DAS secara menyeluruh meliputi keseluruhan bagian mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga limpasan yang sampai di wilayah hilir atau pesisir tidak sampai memperparah kejadian banjir di wilayah tersebut, terutama jika berbarengan dengan waktu terjadi pasang air laut yang menyebabkan banjir.

3. *Vulnerability* (Kerentanan)

Kerentanan dapat digambarkan sebagai kondisi ketidak mapuan masyarakat, struktur bangunan, pelayanan atau kondisi geografi wilayah dalam menghadapi atau mengurangi dampak kerusakan atau gangguan dari ancaman bahaya yang akan dihadapi oleh masyarakat. Kondisi ini juga dapat disebabkan oleh kelalaian manusia sehingga semakin memperparah keadaan dan kondisinya suatu wilayah.



Gambar 4.5 Gambaran kerentanan yang dihadapi

Pada gambar b. digambarkan kondisi bencana yaitu ancaman batu tersebut jatuh sehingga mengenai manusia dan bangunannya. Apabila tidak

melakukan upaya pengurangan dan pencegahan yang diperburuk dengan kondisi ketidakmampuan maka disebut sebagai kerentanan.

Kerentanan juga digunakan untuk mengukur ancaman/bahaya yang akan di terima oleh masyarakat, semakin tinggi tingkat kerentanan suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkatan ancaman/bahaya yang akan dihadapi oleh masyarakat tersebut.

a. Kecamatan Binamu

“Semua warga di Desa Sapanang menganggap bahwa banjir yang terjadi hanya banjir musiman sehingga masyarakat tidak melakukan kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga pada saat terjadi banjir bandang semua masyarakat panik yang menyebabkan masyarakat tidak siap sehingga bencana banjir bandang tersebut terjadi begitu saja tanpa adanya kegiatan kesiapsiagaan” (wawancara dengan masyarakat desa spanang 10/05/2022)

Hubungan dengan teori yang digunakan yaitu salah satu factor dari kerentanan diukur dari kesiapan suatu wilayah atau kelompok dalam menghadapi suatu bencana. Karena kurangnya komunikasi antara pemerintah maupun pihak bendungan karaloc dengan masyarakat menyebabkan masyarakat hanya bisa menyelamatkan diri masing-masing dan tanpa persiapan apapun.

Tanggul yang dibuat pemerintah untuk mencegah air sungai meluap kepemukiman warga masih kurang dilihat dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tanggul yang dibangun hanya di beberapa titik saja sedangkan wilayah pemukiman dan wilayah pertanian masih membutuhkan tanggul yang lebih untuk menangkal air sungai meluap kepemukiman masyarakat dan wilayah pertanian.

Kerentanan ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat dan ekonomi produktif masyarakat seperti lahan pertanian yang Sebagian besar masyarakat di Desa Sapanang Kecamatan Binamu berprofesi sebagai petani. Setiap kali memasuki puncak musim hujan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani mengalami kerugian karena air sungai yang meluapke wilayah pertanian masyarakat.

Pada saat banjir bandang terjadi diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah mendangkanya sungai dan tanggul yang masih kurangmampu untuk menahan debit air yang tinggi sehingga air sungai sangat mudah memasuki wilayah pemukiman masyarakat dan pertanian masyarakat.

"kami tidak bisa berbuat banyak karena dana kami terbatas sementara untuk melakukan pembangunan tanggul membutuhkan dana yang sangat besar jadi kami di desa hanya berharap kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan pembangunan tanggul yang baru supaya bisa mencegah terjadinya banjir susulan. (wawancara dengan pemerintah desa sapanang 10/05/2022)".

Hubungan antara teori dengan hasil wawancara adalah kondisi ketidakmampuan pemerintah yang ikut mempengaruhi kerentanan terhadap suatu bencana karena untuk melakukan pencegahan dengan melakukan pembangunan secara fisik membutuhkan dana yang sangat besar sehingga diperlukan Kerjasama antara pemerintah desa, kabupaten, maupun tingkat provinsi untuk melakukan pencegahan tersebut.

b. Kecamatan Rumbia

Pembuatan sawah yang berada di atasbukit yang dibawahnya merupakan pemukiman warga membuat tingkat kerentanan wilayah ini menjadi tinggi karena saluran pembuangan air sawah perlahan-lahan

mengikis tanah, hal ini yang menjadi penyebab terjadinya longsor yang menutup aliran sungai sehingga menyebabkan banjir bandang di Desa Rumbia.

"Faktor alam dan factor kelainan manusia menjadi factor terjadinya bencana alam pada wilayah ini, kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memperhatikan kondisi lingkungannya, tidak memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi ketika melakukan pembuatan sawah yang berada di atas bukit tersebut. Dibeberapa bukit yang berada di pinggiran jalan juga tidak memiliki tembok penahan, sehingga sangat rawan terjadi longsor ketika memasuki musim hujan (wawancara dengan kepala desa rumbia 09/05/2022)"



Gambar 4.6 Daerah persawahan masyarakat yang berada di atas perbukitan dan menyebabkan tanah longsor

Berkaitan dengan hal itu kondisi ini juga perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk membuat tembok penahan di beberapa titik rawan agar dapat mengurangi risiko bencana yang akan di hadapi kedepannya. Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan

pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan.

Berdasarkan kerentanan sikap dan motivasi masyarakat berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang bencana dan kemampuan mereka untuk mengurangi atau mengatasi dampak bencana, hal mana juga tercermin dalam penetapan prioritas utama masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Tingkat kepadatan pemukiman penduduk yang memiliki korelasi yang kuat terhadap jumlah korban jiwa yaitu, perlu adanya penilaian tentang dimana wilayah hazards dalam hubungannya dengan dimana orang bekerja dan bermukim.

Kerentanan fisik yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi suatu bahaya bencana. Misalnya adalah kekuatan bangunan dan posisi rumah ikut mempengaruhi kerentanan, kurangnya tanggul pengaman banjir bagimasyarakat yang tinggal di bantaran sungai, serta persepsi dan kepercayaan masyarakat tentang hazards, dampaknya dan hubungannya dengan upaya mitigasi.

c. Kecamatan Tarowang

Kerentanan pada wilayah ini hampir mirip dengan Kecamatan Binamu, karena wilayah ini berada pada daerah aliran sungai maka yang menjadi sorotan Ketika terjadi banjir yaitu tanggul dan aliran sungainya, apakah aliran sungainya masih normal atau sudah mengalami pendangkalan seperti yang terjadi di Kecamatan Binamu.

Wilayah ini juga memiliki tingkat kerentanan yang sama dengan Kecamatan Binamu yaitu sama-sama membutuhkan pembangunan tanggul dan pengerokan aliran sungai agar aliran sungai menjadi lancar, akan tetapi untuk melakukan pembangunan tanggul dan pengerokan memerlukan biaya yang sangat besar sehingga kegiatan pencegahan ini masih belum maksimal untuk menanggulangi bencana banjir pada wilayah ini.

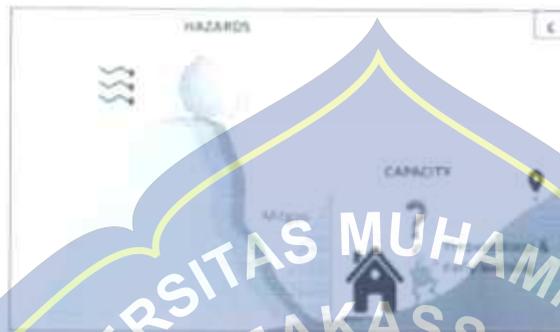
“Kondisi masyarakat pada wilayah ini masih belum begitu sadar akan lingkungannya, masyarakat disini masih meyakini bahwa jika terjadi suatu bencana itu tidak terlepas dari takdir yang telah ditetapkan oleh sang pencipta alam semesta ini tanpa ada kemauan untuk menekankan aspek-aspek progresifitas dan usaha untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungannya (wawancara dengan masyarakat desa tarowang 19/05/2022)”.

Sementara itu telah banyak upaya yang dilakukan oleh kalangan pemikir pada masing-masing agama dan kepercayaan untuk mengembangkan pemahaman yang progresif dalam melihat perubahan sosial pada masyarakat, yang menjelaskan betapa manusia juga memiliki peran tertentu dalam mengupayakan nasibnya termasuk dalam melihat bencana dan ancaman bencana yang akan diterimanya.

4. Capacity (Kapasitas)

Kapasitas dapat diartikan sebagai sumberdaya atau kekuatan yang dimiliki pada suatu wilayah tertentu dalam masyarakat dan lingkungannya yang memungkinkan untuk mencegah, mempersiapkan, mengatasi, dan memperbaiki dampak suatu bencana dengan cepat. Kapasitas fisik, kapasitas sosial, kapasitas kelembagan, dan kapasitas ekonomi ikut mempengaruhi

ketahanan dan kemampuan masyarakat dan lingkungan sosialnya dalam menghadapi ancaman bencana.



Gambar 4.7 Gambaran upaya peningkatan kapasitas

Apabila manusia melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, rencana evakuasi, tanggap darurat, dan Langkah-langkah lainnya maka dapat dikatakan telah melakukan pengurangan risiko bencana sebagaimana di ilustrasikan pada gambar c.

Dalam pendekatan kapasitas masyarakat memerlukan pengetahuan dasar mengenai bencana banjir, pola adaptasi masyarakat terhadap lingkungan untuk mencegah bencana dan Tindakan kesiapsiagaan untuk cepat menanggapi suatu bencana Ketika terjadi suatu bencana.

a. Kecamatan Binamu

Pada wilayah ini tingkat kapasitasnya lebih tinggi dari beberapa wilayah di Kabupaten Jeneponto, dilihat dari posko siagabencana yang dibuat pada setiap desa dan kelurahan untuk menginfokan dan mengantisipasi dengan cepat ketika terjadi bencana banjir. Kapasitassosial yang dimiliki masyarakat Kecamatan Binamu sangat bermanfaat dan berguna bagimasyarakat Ketika untuk melakukan beberapa pencegahan dan

pengarahan kepada masyarakat agar dapat memperkecil dampak dari bencana dan mempercepat pemulihan.

Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir sangat penting untuk diketahui karena hal ini memberikan gambaran kondisi nyata dalam menghadapi bencana. Ancaman bencana banjir dapat terjadi sewaktu-waktu tetapi apa bila masyarakat memiliki kemampuan untuk menanggulangi ancaman tersebut maka risiko bencana dapat dikurangi. Tindakan untuk mengurangi bahaya banjir merupakan tindakan yang dilakukan warga agar bahaya banjir tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Kegiatan ini dilakukan pada waktu prabencana yang bersifat kolektif atau individu.

Kesiapan menghadapi banjir di masyarakat dilihat ada tidaknya suatu tanda apabila terjadi banjir masyarakat dapat segera melakukan Tindakan penyelamatan secara cepat. Berdasarkan hasil kerja lapangan penulis menemukan tanda jalur evakuasi dan tanda darurat apabila terjadi banjir di Kecamatan Binamu sehingga memudahkan kelompok rentan dan masyarakat pada umumnya untuk menyelamatkan diri.

“Terdapat dua kelompok umur rentan yang harus mendapat prioritas pertolongan saat terjadi banjir yaitu anak-anak dan lansia. Untuk lansia, alasannya secara fisik sudah lemah dan mudah sakit sehingga memerlukan bantuan dari orang lain. Sedangkan anak-anak, anak-anak belum mengerti tentang bahaya air, anak-anak pada saat banjir terjadi justru bermain sehingga membutuhkan pendampingan orang tua atau orang dewasa (wawancara dengan pemerintah desa sapanang 10/05/2022)”.

Sehubungan dengan itu kelompok rentan merupakan merupakan Kelompok masyarakat berisiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam

menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana. Kelompok ini berisiko tinggi karena pada saat bencana terjadi akan merasakan dampak yang lebih besar daripada kelompok masyarakat lainnya. Mengelola risiko yang ada pada kelompok rentan akan lebih efektif dengan melibatkan mereka kedalam kegiatan pengurangan risiko bencana karena akan lebih mau menggali kebutuhan mereka secara mendalam sehingga kebijakan dan aksi pengurangan risiko bencana dapat diselenggarakan tanpa mengabaikan kebutuhan kelompok rentan tersebut.

b. Kecamatan Rumbia

Upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan upaya maupun kapasitas yang dimiliki masyarakat dalam meminimalisir risiko dengan mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Kegiatan meredam ancaman yang dimaksud adalah kegiatan untuk meredam terjadinya ancaman yang dapat menimbulkan risiko seperti melakukan kegiatan penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak rusak sehingga bencana alam dapat terhindarkan atau minimal dapat mengurangi dampak dari suatu bencana.

Kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan oleh pemuda pemudi Karang Taruna Kecamatan Rumbia memiliki manfaat yang sangat besar terhadap lingkungan masyarakat Rumbia, dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya membuang sampah sembarangan serta penebangan pohon tanpa memikirkan dampak lingkungannya.

"Pemuda Karang Taruna melakukan kegiatan tahunan untuk melakukan penanaman pohon untuk menjaga hutan di Kecamatan Rumbia tetap terjaga dan kegiatan bulanan yang dilakukan seperti menggerakkan setiap elemen masyarakat pada setiap desa untuk melakukan kegiatan bulan bersih yang dilakukan setiap bulan. Kegiatan yang dilakukan pemuda Karang Taruna meningkatkan kapasitas masyarakat rumbia dalam mencegah dan menghadapi suatu ancaman bahaya bencana (wawancara dengan masyarakat desa rumbia 09/05/2022)".

Sehubungan dengan itu kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi atau menghindarkan terjadinya risiko bencana. Mengurangi kerentanan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi kondisi lemah yang ada di masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko bencana dan dampak yang ditimbulkan jika terjadi bencana. Meningkatkan kapasitas adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan yang ada di masyarakat, dalam rangka mempersiapkan kemungkinan terjadinya bencana. Kapasitas yang semakin tinggi maka risiko bencana akan dapat berkurang.

Penanaman pohon dalam skala banyak mampu mendukung tumbuhnya hutan lestari sehingga menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki fungsi wisata. Sedangkan, fungsi konservasi mencakup konservasi udara, air, dan lahan. Konservasi dari sisi udara, pohon dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Keberadaannya mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim. Konservasi air, maksudnya meningkatkan ketersediaan debit sumber mata air dan sungai. Dengan penanaman pohon-pohon tertentu dapat menjadi penyelamat mata air. Dari sisi konservasi lahan, mampu meminimalisir bencana alam karena erosi seperti tanah longsor dan banjir.

c. Kecamatan Tarowang

Berdasarkan hasil penelitian untuk wilayah Kecamatan Tarowang khususnya Desa tarowang memiliki kapasitas dari segi pembangunan fisik hanya saja belum maksimal. Pembuatan posko siaga bencana dan tempat pengungsian masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah membantu masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan peringatan dini Ketika akan terjadi bencana dan mendapatkan tempat untuk menyelamatkan diri Ketika terjadi bencana banjir bandang.

“Dengan adanya posko siaga bencana yang dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan peringatan dini kepada masyarakat Ketika diperkirakan akan terjadi bencana, selain itu kegiatan penanggulangan dan pencegahan merupakan fungsi dari posko siaga bencana ini hanya saja dalam hal pencegahan masih kurang maksimal sehingga hanya peringatan yang diberikan kepada masyarakat (wawancara dengan masyarakat desa tarowang 19/05/2022)”.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara ditemukan bahwa pemerintah telah melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan kapasitas fisik seperti pembuatan posko siaga bencana namun masih perlu beberapa peningkatan kapasitas lainnya seperti peningkatan fungsi posko siaga bencana yang tidak hanya memberikan peringatan tetapi juga melakukan upaya penyadaran masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat yang belum paham mengenai bencana banjir.

“Sementara itu bangunan fisik yang dibuat untuk meminimalisir bencana banjir rusak parah pasca bencana banjir bandang, sehingga untuk meningkatkan tingkat kapasitas pada wilayah ini perlu melakukan perbaikan bendungan dan perbaikan tanggul yang rusak akibat bencana banjir bandang

tersebut. Pascabencana banjir bandang sampai saat ini, bendungan yang rusak masih belum dilakukan rekonstruksi sehingga tingkat kapasitas pada wilayah ini menjadi berkurang (wawancara dengan masyarakat desa tarowang 19/05/22)”

Sehubungan dengan itu jika ingin melakukan peningkatan kapasitas maka pemerintah harus segera melakukan rekonstruksi terhadap bangunan yang telah rusak pasca banjir bandang karena kondisi ini jika tidak ditangani dengan segera maka akan meningkatkan kerentanan masyarakat sehingga risiko bencana yang di terima oleh masyarakat akan lebih tinggi jika tidak segera ditangani.

Peningkatan kapasitas sangat diperlukan dalam rangka pengurangan risiko maka masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam peningkatan kapasitas, masyarakat harus mengawasi wilayah yang perlu untuk dilakukan pembenahan dan pemerintah harus segera melakukan Tindakan untuk meningkatkan kapasitas wilayah tersebut agar angka korban jiwa dan kerugian dapat dikendalikan.

C. Pembahasan

1. *Risk* (Risiko)

Tingginya kerusakan pada sejumlah daerah aliransungai (DAS) menjadi pemicu terjadinya bencana. Kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS di Kabupaten Jeneponto telah teridentifikasi seperti ditunjukkan dengan sering terjadi banjir, erosi, sedimentasi, dan tanah longsor. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit,

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dalam melihat risiko bencana yang dialami oleh masyarakat disebabkan oleh lokasi pemukiman warga dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi risiko bencana yang dialami oleh masyarakat. Diperlukan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir yang sering terjadi di beberapa titik di Kabupaten Jeneponto agar masyarakat merasa terlindungi oleh bencana banjir.

★ Dari hasil penelitian dan teori yang dikemukakan dapat dilihat bahwa risiko bencana banjir tidak dapat benar-benar dihilangkan akan tetapi dapat dilakukan pengurangan terhadap risiko bencana yang akan dihadapi dengan melakukan pengurangan kerentanan dan meningkatkan kapasitas suatu wilayah.

2. *Hazard* (Ancaman/Bahaya)

Ancaman atau bahaya merupakan suatu kondisi atau kejadian yang berbahaya sehingga mengancam atau berpotensi mengakibatkan kehilangan jiwa atau harta benda maupun kerusakan lingkungan hidup. Ancaman atau bahaya juga merupakan tingkatan kedua setelah risiko, semakin besar suatu risiko yang dihadapi semakin besar pula ancaman bahaya yang akan diterima. Ketika terjadi suatu bencana.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa ancaman atau bahaya yang sering dialami oleh masyarakat adalah kehilangan

nyawa, harta benda, gangguan psikologis, kerusakan lingkungan dan infrastruktur akibat bencana banjir yang terjadi. Selain itu bencana banjir juga dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Ketika terjadi banjir sehingga kondisi ekonomi masyarakat menjadi melemah.

Dari hasil penelitian dan teori yang dikemukakan dapat dilihat bahwa ancaman atau bahaya yang diterima oleh masyarakat berasal dari risiko yang dihadapi oleh masyarakat karena semakin tinggi tingkat risiko maka ancaman atau bahaya akan semakin besar. Jadi pengaruh risiko menjadi penentu tingkat besaran ancaman atau bahaya yang akan diterima.

3. *Vulnerability* (Kerentanan)

Kerentanan digambarkan sebagai karakteristik dan situasi sebuah masyarakat, sistem, atau aset yang membuat masyarakat mudah terkena dampak merugikan dari suatu bencana atau dapat juga digambarkan sebagai kondisi ketidakmampuan suatu kelompok, lingkungan, maupun struktur bangunan dalam menghadapi suatu bencana.

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah masih belum bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dilihat dari tanggul yang masih membutuhkan penambahan, sungai dangkal yang perlu dilakukan pengerokan, dan tembok penahan tanah untuk wilayah pegunungan. Selain itu diperlukan penyadaran terhadap masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu untuk menghadapi suatu ancaman bahaya yang akan dihadapi.

Dari hasil penelitian dan teori yang dikemukakan bahwa ketidakmampuan struktur bangunan, masyarakat, dan pemerintah yang menjadi factor kerentanan sehingga masyarakat mudah terkena dampak merugikan dari suatu bencana. Kerentanan itu sendiri dapat dikurangi dengan meningkatkan kapasitas pada suatu wilayah tertentu yang terindikasi rawan bencana.

4. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas merupakan kemampuan suatu wilayah dan masyarakat untuk melakukan Tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana. Kapasitas daerah juga diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring, dan mengembangkan kapasitas daerah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi suatu bencana dengan melakukan sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembuatan posko siaga bencana dan pembangunan tanggul di beberapa titik lokasi rawan bencana dan lokasi juga pengungsian. Upaya yang dilakukan baik dari pemuda dan masyarakat sangat membantu masyarakat dalam menghadapi suatu bencana, hanya saja masih kurang maksimal.

Dari hasil penelitian dan teori yang dikemukakan tingkat kapasitas dalam menghadapi suatu ancaman bencana dinilai masih kurang baik dari segi pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kapasitas suatu wilayah demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Dari keempat terminology dalam kebencanaan mempunyai hubungan satu sama lain dan dapat digunakan untuk mengetahui besaran ancaman dan dampak sebuah bencana. Lebih penting lagi dapat mengukur sejauh mana dan sebaik apa suatu masyarakat dapat merespon suatu bencana.

Ancaman merupakan suatu kondisi biasa. Namun, tingkat ancaman bencana akan meningkat ketika tingkat kerentanan meningkat dan kapasitas untuk mengatasi ancaman tersebut menuju. Semakin tinggi ancaman bahaya disuatu daerah maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Dengan kata lain, frekuensi atau kemungkinan ancaman dan kerentanan berpengaruh kepada tingkatan risiko atau dampak bencana yang terjadi.

Hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas dirumuskan dalam sebuah persamaan umum yang digunakan untuk menghitung risiko bencana yang akan menghasilkan sebuah dampak dari suatu bencana didalam suatu Kawasan. Lanjutan dari penilaian risiko bencana tersebut dapat dijadikan sebagai masukan utama untuk Menyusun perencanaan manajemen bencana.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Risiko bencana yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi dengan melakukan pencegahan dan meningkatkan kapasitas masyarakat serta mengurangi kerentanan pada lingkungan dan masyarakat.
2. Bahaya terhadap masyarakat terjadi apabila terjadi sebuah bencana, bahaya yang dihadapi berupa kehilangan nyawa, harta benda, kerusakan lingkungan, rusaknya fasilitas umum dan gangguan psikologis terhadap masyarakat tergantung dari tingkat risiko.
3. Tingkat kerentanan pada wilayah Kabupaten Jeneponto masih tinggi kondisi itu dapat dilihat dari ketidakmampuan masyarakat, struktur bangunan, dan pemerintah menjadi factor penyebab masyarakat gampang terkena dampak dari bencana. Perlunya Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kerentanan dari suatu wilayah.
4. Upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna memberikan dampak pencegahan terhadap pengrusakan lingkungan namun masih belum diterapkan pada seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Posko siaga bencana dan posko

pengungsian merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi.

B. Saran

Adapun saran dan rekomendasi dari penulis terkait penelitian tentang Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu :

1. Agar tetap melanjutkan kegiatan penyadaran masyarakat yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna dan dapat menerapkan kegiatan tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto agar masyarakat lebih memperhatikan dan menjaga lingkungannya dan taklupa juga melibatkan tim psikolog dan pemuka agama untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang mengalami trauma.
2. Melakukan pembangunan dan perbaikan tanggul dan bendungan yang rusak pasca bencana banjir bandang serta menambah Panjang tanggul sepanjang pingiran sungai dan tembok penahan tanah untuk wilayah pegunungan untuk mencegah longsor terjadi.
3. Perlu melakukan pengerokan sungai yang mengalami pendangkalan akibat pengikisan daerah aliran sungai sehingga air sungai tidak gampang meluap kepemukiman masyarakat atau melakukan pemindahan pemukiman masyarakat yang berada pada daerah aliran sungai ketempat yang lebih tinggi dan membuat danau buatan untuk menampung debit air yang tinggi.

4. Identifikasi tingkat kerentanan dapat dilakukan dengan metode yang lebih bersentuhan langsung dengan penduduk sekitar seperti memanfaatkan partisipasi masyarakat maupun pemangku kebijakan atau pemerintah daerah karena mereka sendirilah yang mengetahui bagaimana kondisinya dan lingkungannya.
5. Setelah melakukan Assesment penulis menyarankan dimana beberapa titik secara visual perlu penanganan prioritas karena berdampak langsung terhadap mobilitas, dan produktifitas ekonomi masyarakat Jenepono khususnya masyarakat terdampak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). *Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis*. Bumi Aksara.
- Andri, A. E. P. (2021). PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR. *Jurnal Ilmu Teknik*, 1(2).
- Anjarsari, E. R. (n.d.). *ANALISIS PERENCANAAN PENYLAGAAN BENCANA DI RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG KABUPATEN JEMBER*.
- Arifianto, S., & Virhani, M. R. (2009). Informasi Bencana dan Budaya Lokal (Kasus Penanggulangan Banjir di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan). *Diseminasi Informasi Pengurangan Resiko Bencana Di Daerah Rawan Bencana, Puslitbang Apel SKDI Balubang SDM Kominfo*, 1–30.
- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awaliyah, N. (2014). *Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
- Dewi, R. K., Rani, D. M., Mustika, I. F., Elon, Y., Irfandi, A., Septiawati, D., Mandias, R., Manurung, J., Susanty, S. D., & Laziana, T. (2021). *Manajemen Gawat Darurat dan Bencana*. Yayasan Kita Menulis.
- Fadillah, M., Sugiharti, D. K., & Radjab, A. M. (2020). PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA. *MAGISTRA Law Review*. <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i2.1604>
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan kesiapsiagaan stakeholder dalam pengurangan risiko bencana alam gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30–40.
- Hawing, H. (2021). Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(1), 63–74. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.185>
- INDONESIA, P. R. (24 C.E.). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Islam, M. S. (2021). *Analisis semiotika mitigasi bencana pandemi dalam film "Contagion"*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Istiqomah, U. (2019). *DISASTER MANAGEMENT (Studi Peran Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Kabupaten Sampang)*. University of Muhammadiyah Malang.

- Jamil, M., & Togubu, J. (2016). Implementasi Teknologi Wireless Sensor Network (WSN) untuk Monitoring Pergeseran Tanah. *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 3(2), 87–89.
- Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Khambali, I., & ST, M. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Penerbit Andi.
- Lestari, E. (2019). *TA: KAJIAN STRATEGI MITIGASI BENCANA TSUNAMI DAN KESIAPSIAGAAN PUBLIK DI DESA PANGANDARAN*. Institut Teknologi Nasional.
- Lestari, P. (2018). *KOMUNIKASI BENCANA ASPEK PENTING PENGURANGAN RISIKO BENCANA*. PT KANISIUS.
- Minhar, D. R., & Aco, F. (2021). Mitigasi Bencana Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kelurahan Gayambarjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 368–381.
- Noor, D. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Deepublish.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*.
- Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi sadar bencana melalui sosialisasi kebencanaan sebagai upaya peningkatan pengetahuan siswa terhadap mitigasi bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 49–55.
- Priowidodo, G., & Luk, J. E. (2013). Literasi mitigasi bencana tsunami untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Pacitan Jawa Timur. *Ekotrans*, 13(1), 47–61.
- Safii, M., Zalis, M., & Mawengkang, H. (2020). Analisis Strategi Optimal Lokasi Evakuasi Bencana Menggunakan Pure Strategy Pada Game Theory. *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*, 2, 155–160.
- Sebastian, L. (2008). *Pendekatan pencegahan dan penanggulangan banjir*.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*, 2, 1–11. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i2.1092>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, M. (2007). *Kualitaitaif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2010. *Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Suryana, S., SETIAWAN, A. Y., & OKTAPIANA, S. K. (2018). Mitigasi Bencana Banjir yang Dilakukan oleh Masyarakat di Desa Bojong Kecamatan Majalaya

- Kabupaten Bandung. *GEOAREA | Jurnal Geografi*, 1(2), 54–64.
- Tondobaka, L. (2012). Pendekatan Untuk Menentukan Kawasan Rawan Bencana Di Pulau Sulawesi. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur*, 3(2).
- Umar, N. (2013). Pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir di bolapapu kecamatan kulawi sigi sulawesi tengah. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 8(3), 105–119.



L



A

N

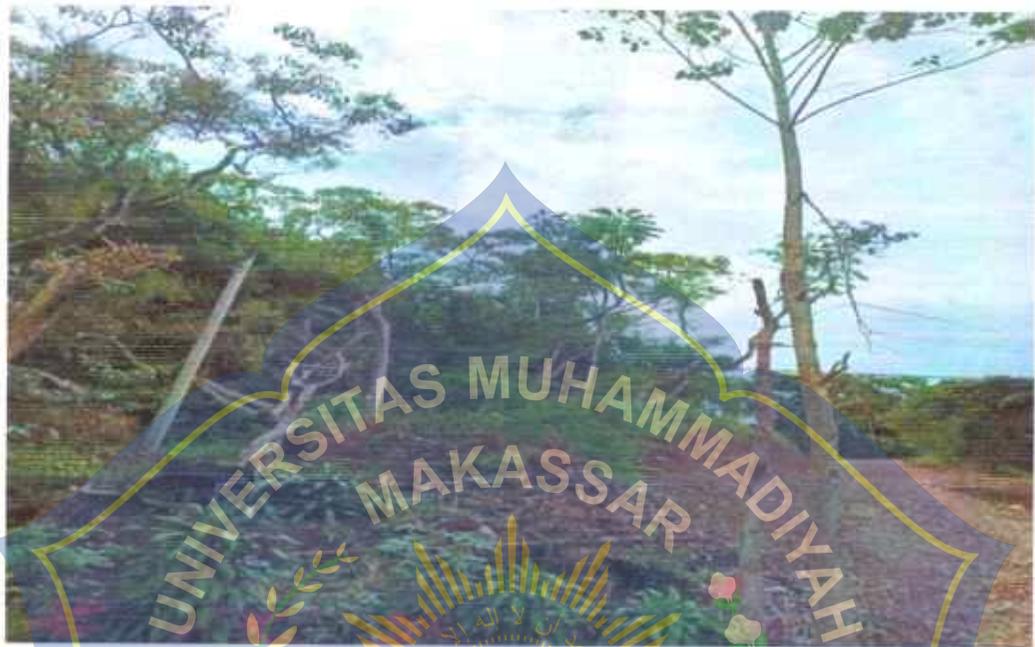
DOKUMENTASI



Gambar 1 wawancara dengan masyarakat desa rumbia 09/05/2022



Gambar 2 wawancara dengan kepala desa rumbia 09/05/2022



Gambar 4 lokasi bencana kecamatan rumbia



Gambar 3 lokasi bencana kecamatan rumbia



Gambar 5 wawancara dengan sekretaris desa sapanang kec. Binamu 10/05/2022



Gambar 6 sungai allu kecamatan binamu 10/05/2022



Gambar 7 lokasi bencana desa tarawang 10/05/2022



Gambar 8 wawancara dengan kepala desa tarawang 10/05/2022



*Gambar 9 wawancara dengan kasi pencegahan BPBD kabupaten jeneponto
20/05/2022*



PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
No 268/A.3-III/II/1443/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah dietujui Ketua Jurusan Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Makassar menunjuk pengantar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara.

Nama : Muh Yasri Wahyudin
Sampul : 0504 1700 100
Mufusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi:
"Disaster Management dalam Mengani Bencana Banjir Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto"

Pembimbing I : Ahmad Harakan, S.IP, S.H
Pembimbing II : Hardianto Hlawina, S.T, M.A

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara mandiri, berkesinambungan dan bertanggung jawab di serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 04 Maret 2022
Dekan


Rizki Nur Hafidha, S.Sos, M.Si
NBN 170727

- Tembusan Kepada Yth.
1. Pembimbing I
 2. Pembimbing II
 3. Ketua Jurusan
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Arsip



Universitas Muhammadiyah Makassar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Meneng Ulu Lembang 1, Jalan Sultan Muhammad Syarif, Makassar 90221

Telp. (0411) 844.972 Fax. (0411) 845.588

Official Email: fsp@umh.ac.id

Official Web: <http://fsp.umh.ac.id>

Nomor : 0506/OSP/A.6-VIII/A/1443/H/2022/M
Lamp. : 1 (satu) Eksampul
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Unismuh
Di
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian di lapangan untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu sekiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada:

Nama Mahasiswa : Moh. Yusril Wahyuddin

Stambuk : 105641110618

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Rumbek, Talawang dan Binamu Kabupaten Jeneponto

Judul Skripsi : "Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan keramahan yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wa. Wb.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 01 April 2022

Dipilih

Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos., M.Si
NPM: 730 727



Program for the Nation and Humanity

Public Administration - GIN

Scanned by TapScanner



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 29201/S.01/PTSP/2022
 Lamiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Bupati Jeneponto

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPM UNISMUH Makassar Nomor : 1240/05-C.4-VIII/143/2022 tanggal 01 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUK. YUSRIL WAHYUDDIN**
 Nomor Pokok : 105641110618
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

*** MANAJEMEN BENCANA BANJIR BERBASIS MITIGASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO ***

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 06 April s.d 06 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demiikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditertibkan di Makassar
 Pada tanggal : 04 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Setaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19650606 199003 2 011

Terselaku Yth:
 1. Ketua LPM UNISMUH Makassar di Makassar
 2. Penanggung

SINAP PTSP/04/04/2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://dmap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



Scanned by TapScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin No. 255 Makassar 90222 Telp. (0411) 964572, 964591, Fax (0411) 964588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Yusuf Wahyudin

NIM : 20504100118

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Kumulatif Batas
1	Bab 1	100%	
2	Bab 2	100%	25%
3	Bab 3	100%	70%
4	Bab 4	100%	100%
5	Bab 5	100%	100%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 25 Juli 2022

Mengetahui

Ketua UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Hum, M.P.
No. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 255 makassar 90222
Telepon (0411) 964572, 964 593, fax (0411) 9645 588
Website: www.umh.ac.id
E-mail: perpustakaan@umh.ac.id

Scanned by TapScanner

RIWAYAT HIDUP



Muh. Yusril Wahyuddin, Lahir pada tanggal 20 Januari 2001, di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penulis Merupakan Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Jamaluddin dan Hasnah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Inpres Bumbungloe 220 pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Kelara kemudian tamat pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kelara Kabupaten Jeneponto kemudian tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul "**Manajemen Bencana Banjir Berbasis Mitigasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto**". Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.



Submission date: 25-Jul-2022 09:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 1874758767

File name: BAB_1_58.docx (25,27K)

Word count: 881

Character count: 6069

BAB I Muh Yusril Wahyuddin 105641110618

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

1

arifhimaniasocialworker.blogspot.com

6%

2

katiz.org

2%

3

mymemory.translated.net

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN





Submission date: 25-Jul-2022 09:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 1874759440

File name: BAB_2_44.docx (52.94K)

Word count: 2456

Character count: 16883

24%

25%

7%

17%



1

2

3

4

5

6

7

8

mackassarnews.com

repository.uin-suka.ac.id

repository.uin-suka.ac.id

repository.uin-suka.ac.id

vm36.upi.edu

jurnal.uin-suka.ac.id

id.scribd.com

pdfcoffee.com

7%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Submission date: 25-Jul-2022 09:55AM (UTC+0700)
Submission ID: 1874759895
File name: BAB_III_-_2022-07-25T105322.044.docx (24.5K)
Word count: 883
Character count: 5843

BAB III Muh Yusril Wahyuddin 105641110618

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



mahasiswa.or.id

6%



repository.uinpuwokerto.ac.id

2%



escribd.com

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches





Submission date: 25 Jul 2022 09:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 1874760652

File name: BAB_IV.docx (1.17M)

Word count: 7452

Character count: 49543

BAB IV Muh Yusril Wahyuddin 105641110618





Submission date: 25-Jul-2022 09:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 1874760948

File name: BAB_V_-_2022-07-25T105322.251.docx (17.09K)

Word count: 350

Character count: 2468

BAB V Muh Yusril Wahyuddin 105641110618

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

LULUS

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1

core.ac.uk

3%

2

pakwis.wordpress.com

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
JPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

